

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan paling kritis yang ditangani oleh pembangunan global adalah kemiskinan. Sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang pertama, yaitu "No Poverty". Kemiskinan didefinisikan tidak hanya sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan juga berkaitan dengan berbagai faktor sosial ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan World Bank (2023), sekitar 8,4% dari populasi global masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, menghasilkan pendapatan harian kurang dari US\$ 2,15.

Pendahuluan dalam konstitusi UUD 1945 menetapkan tujuan esensial dari pembangunan nasional Indonesia mencakup upaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat. umum. Istilah "kesejahteraan umum" mengacu pada situasi di mana semua orang di suatu negara memiliki akses terhadap kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang mendasar untuk menjalani kehidupan yang layak dan berkembang, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Salah satu ukuran kesejahteraan di Indonesia adalah derajat kemiskinan penduduk secara keseluruhan. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan berbanding terbalik dengan kebahagiaan penduduk secara keseluruhan. Semakin sedikit orang dalam suatu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, semakin besar rasa sejahtera mereka secara keseluruhan.

Menurut Nurkse (1953) dari perspektif penawaran dan permintaan, dua siklus yang saling berhubungan yang memperkuat akar struktural kemiskinan dapat dijelaskan. Dari perspektif penawaran, dapat dikatakan bahwa pendapatan rendah, yang merupakan akibat dari produktivitas rendah, menyebabkan rendahnya kapasitas untuk menabung. Hal ini menyebabkan pembentukan modal yang buruk, yang selanjutnya merugikan produktivitas. Sebaliknya, insentif untuk menginvestasikan modal cukup rendah dalam konteks permintaan di negara-negara miskin karena kurangnya pasar untuk banyak komoditas. Kurangnya pembentukan modal di masa lalu, yang terkait dengan rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan penduduk, merupakan akar penyebabnya. Kurangnya insentif investasi berkontribusi pada kelangkaan modal.

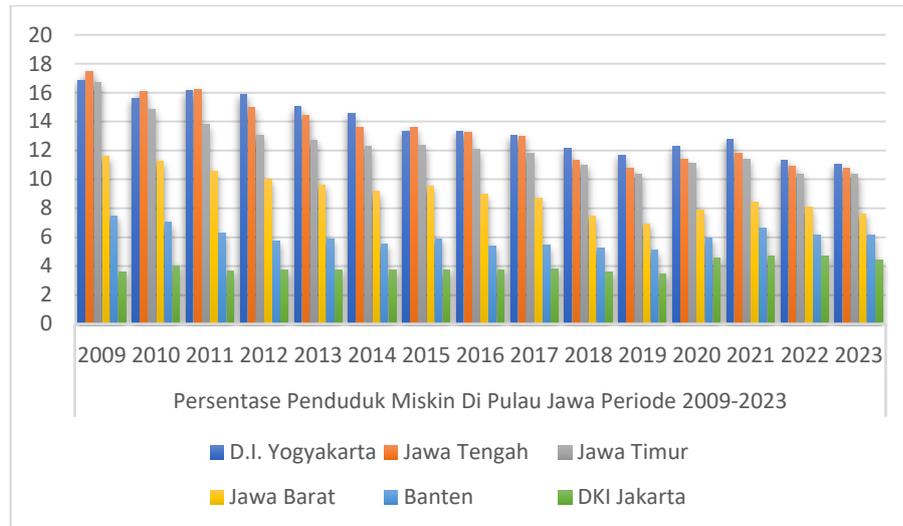
Beberapa faktor yang memicu kemunculan kemiskinan di Indonesia mencakup sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, kurangnya pengelolaan sumber daya alam (SDA), tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan pengetahuan dalam pengembangan sektor ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, luasnya pertumbuhan wilayah, serta perbedaan antar wilayah yang menjadi ciri khas kemiskinan di Indonesia (Kasriyati, 2021).

Dari total 34 provinsi yang terdapat di Indonesia, sebagian besar tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan, termasuk di dalamnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki ciri khas tertentu terkait dengan kondisi kemiskinannya. Provinsi ini dikenal sebagai pusat pendidikan, dengan lebih dari 300.000 mahasiswa, yang menciptakan dinamika sosial ekonomi yang unik. (Kemendikbudristek, 2023). Sektor pendidikan tinggi, sebagai pendorong utama ekonomi, telah mengalami transformasi signifikan selama periode pandemi, yang

berdampak pada efek berganda terhadap ekonomi lokal serta tingkat kemiskinan masyarakat. Urbanisasi yang terus berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan tantangan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan populasi di kawasan perkotaan, tanpa didukung cukupnya lapangan pekerjaan formal, dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di wilayah pinggiran kota. Selain itu, ketahanan pangan juga menghadapi tantangan, seperti berkurangnya lahan pertanian dan perubahan iklim, yang berimplikasi pada usaha pengentasan kemiskinan. Menurut Dinas Pertanian (2023), kawasan DI Yogyakarta yang sangat tergantung pada impor pangan memerlukan perencanaan yang matang agar dapat menjamin ketahanan pangan jangka panjang.

Pada tahun 2023, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 413.780 jiwa, luas wilayah sebesar 3.185,80 kilometer persegi, serta angka kemiskinan yang tercatat sebanyak 448.470 jiwa. (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan merupakan permasalahan utama di Provinsi DIY yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi serta keterbatasan lahan. Dalam proses perancangan pembangunan pemerintah, isu kemiskinan ini menjadi salah satu tantangan yang perlu ditanggapi dengan serius, karena tingkat kemiskinan yang tinggi atau rendah akan berdampak signifikan terhadap ekonomi lokal.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Periode 2009-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Meskipun tingkat kemiskinan bervariasi di seluruh Indonesia, persentasenya masih melampaui persentase kemiskinan yang tercatat secara nasional. Kondisi ini mencerminkan untuk menanggulangi kemiskinan fokus yang berkelanjutan masih diperlukan pada kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tingkat kemiskinan di DIY adalah yang paling tinggi di Jawa antara tahun 2009 dan 2023, menurut data yang dipaparkan pada Gambar 1.1 di atas. Menurut temuan ini, Provinsi DIY secara konsisten berada di peringkat enam provinsi termiskin di Jawa.

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin DI Yogyakarta Periode 2009-2023

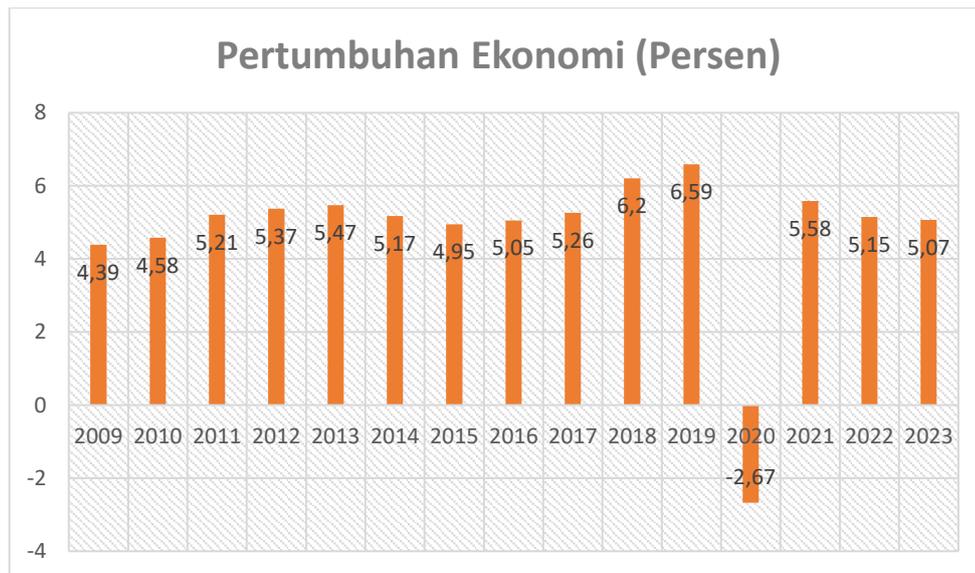


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta berfluktuasi sepanjang kurun waktu 2009–2023. Proporsi penduduk miskin sebesar 40% pada tahun 2009, namun turun tajam menjadi 15,63% pada tahun 2010. Pada tahun 2011, angka kemiskinan menunjukkan tren peningkatan setelah sebelumnya menurun, yaitu sebesar 16,14%. Di tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, angka kemiskinan terus menurun, yaitu sebesar 15,88%, 15,03%, 14,55%, 13,34%, 13,34%, 13,02%, 12,13%, dan 11,7% dari jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan meningkat menjadi 12,28% pada tahun 2020 dan 2021, kemudian turun menjadi 11,34% dan 11,04% pada tahun 2022 dan 2023. Mengingat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan paling dominan di Pulau Jawa, maka penanganan masalah ini menjadi salah satu prioritas utama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dituntaskan secara menyeluruh. Banyak hal yang turut mempengaruhi prevalensi kemiskinan

yang tinggi di kawasan tersebut, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Lihat gambar 1.3 di bawah untuk informasi lebih lengkap.

**Gambar 1.3 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DI Yogyakarta
Periode 2009-2023**



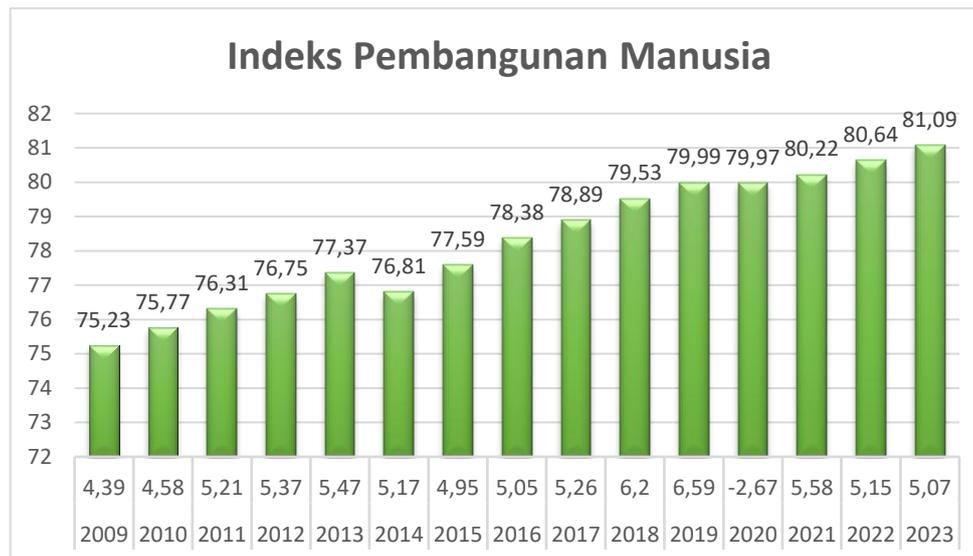
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di berbagai negara, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting. Pembangunan ekonomi di negara ini merupakan hal yang krusial, terutama dalam upaya memberantas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan dampak yang berarti apabila tidak dibarengi dengan pembangunan yang adil dan makmur serta dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh segmen masyarakat, sehingga mendorong pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil sering kali dianggap sebagai salah satu sarana utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, dengan berperan dalam proses pengurangan kemiskinan melalui mekanisme efek limpahan (*trickle-down effect*).

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menentu, dengan laju pertumbuhan rata-rata sejumlah 4,8% tiap tahun antara tahun 2009 dan 2019. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,69% pada tahun 2020. Dampak pandemi masih terasa di berbagai sektor, terutama pariwisata dan UMKM, yang merupakan komponen utama struktur ekonomi daerah, meskipun ada sinyal pemulihan antara tahun 2021 dan 2023 (Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta, 2023), Akibatnya, dinamika ini berdampak besar pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki posisi unik dan sistem pemerintahan otonom, berada dalam posisi yang kuat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan melaksanakan inisiatif penanggulangan kemiskinan (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Otonomi unik yang dimilikinya memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. Meskipun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan, dengan mempertimbangkan banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, tetap diperlukan (World Bank, 2023).

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DI Yogyakarta Periode 2009-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai skala tingkat kapabilitas dan kompetensi individu. Data yang menunjukkan pertumbuhan IPM yang konsisten setiap tahunnya menunjukkan tren positif tersebut. IPM DIY pada tahun 2022 sebesar 80,64, berada pada tingkat yang superior dibandingkan rerata nasional. Capaian ini menjadi cerminan keberhasilan pengembangan kapasitas manusia di daerah tersebut, sehingga menempatkan DIY sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan kualitas sumber daya manusia terbaik. Meskipun demikian, kesenjangan IPM antar wilayah tetap ada, dengan perbedaan yang cukup signifikan antara Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.

Faktor ketiga dari kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Seiring dengan berjalannya waktu, kesempatan kerja bagi tenaga kerja semakin

menurun. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Situasi ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Penjelasan lebih lanjut dapat dicermati di Gambar 1. 4 berikut:

Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DI Yogyakarta Periode 2009-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data Diolah)

Kemiskinan yang tinggi dapat terjadi apabila terdapat sejumlah besar individu yang tidak mempunyai pekerjaan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, mereka terhambat dalam memperoleh penghasilan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan primer mereka sendiri serta keluarga. Kondisi ini menyebabkan terjadinya hambatan dalam mencukupi kebutuhan dasar harian. Adanya interaksi yang mendalam antara kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu fakta yang tidak dapat disangkal. Berdasarkan data dari BPS DI Yogyakarta tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Yogyakarta tercatat sebesar 3,69%, angka yang berada di bawah standar nasional yang berlaku. Salah satu ciri khas pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah tingginya persentase penduduk berpendidikan yang menganggur, yang mencapai

60% dari total pengangguran. Sementara itu, 40% sisanya terdiri dari penduduk dengan pendidikan rendah (setingkat SLTA ke bawah) yang bersedia menerima pekerjaan apapun demi keberlangsungan hidup. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai karyawan atau buruh. Fenomena ini terjadi karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali menyebabkan individu menjadi lebih selektif dalam memilih karir. Dengan demikian, meskipun terdapat peluang kerja, tidak selalu individu berpendidikan SLTA ke atas akan menerima kesempatan tersebut jika dianggap tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemahiran seseorang. Akibat dari hal tersebut, terjadi lonjakan pada tingkat pengangguran di kalangan kelompok dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Sektor utama perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pariwisata, telah mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), terjadi penurunan jumlah wisatawan dari 6,5 juta pada tahun 2019 menjadi 1,8 juta pada 2020, yang berdampak besar terhadap pendapatan masyarakat. Kebangkitan industri pascapandemi merupakan hal yang sangat penting untuk difokuskan, mengingat perannya yang signifikan dalam PDRB serta dalam membuka peluang kerja baru (Kemenparekraf, 2023).

Pengangguran serta kemiskinan memiliki hubungan yang erat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan pendidikan, kondisi perumahan yang tidak layak, serta terbatasnya pilihan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kondisi kehidupan yang memprihatinkan. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam mencari atau memanfaatkan peluang yang ada,

serta dalam pengembangan karier mereka, sehingga semakin menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Pada hakikatnya, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya difokuskan pada perluasan ekonomi, melainkan juga perlu melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana kemiskinan muncul dari proses pembangunan tersebut. Ilmu ekonomi telah mengemukakan beragam teori yang mengeksplorasi berbagai cara untuk mencapai pembangunan ekonomi sekaligus mengejar ketertinggalan. Para ekonom secara umum sepakat bahwa strategi yang paling efektif untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi adalah dengan merumuskan metode yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang melebihi laju pertumbuhan penduduk. Pendekatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan selanjutnya meningkatkan standar hidup untuk semua orang.

Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, teridentifikasi bahwa terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah kemiskinan. Temuan yang dihasilkan oleh berbagai pihak dalam penelitian ini bervariasi dan menunjukkan kurangnya konsistensi. Para peneliti telah mengakui perlunya dilakukan penelitian tambahan untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian tersebut akan melibatkan pelaksanaan serangkaian pengujian guna memahami keunikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan. Berdasarkan konteks tersebut, peneliti berminat untuk melakukan studi mengenai kemiskinan yang terjadi di Provinsi DIY dengan judul yang sesuai, yakni **“Determinasi Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam studi ini dapat dirumuskan:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Respon lebih lanjut dari rumusan masalah yang telah disusun, dapat diketahui tujuan penelitiannya, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka penulis bermaksud mempersempit ruang lingkup penelitian ini agar dapat lebih terfokus dan rinci.
2. Penelitian mencakup series data periode 2009 hingga 2023 Provinsi DI Yogyakarta
3. Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai variabel *independent* dan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel *dependent*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa kontribusi yang menjadi luaran dari studi ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini berpotensi untuk meningkatkan pemahaman yang ada mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan dengan mengintegrasikan unsur-unsur pertumbuhan ekonomi, kapabilitas individu, dan ketenagakerjaan dalam konteks pembangunan daerah.
2. Pada kenyataannya, temuan penelitian ini memberikan nilai tambah dalam bentuk kontribusi terhadap data berharga bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan di DIY. Tinjauan terhadap variabel yang berkontribusi terhadap kemiskinan dapat membantu memandu pilihan intervensi tertentu.

3. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian serupa di berbagai bidang, serta mendorong penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan di tengah perubahan ekonomi dan pergeseran yang terjadi pascapandemi.
4. Temuan penelitian akan diintegrasikan ke dalam perpustakaan sebagai sumber bacaan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai referensi dalam melakukan penelitian mengenai topik yang sejenis.